

**PENGAWASAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG
MEMUAT DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN
BERBASIS DIGITAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Oleh:

ZATWA AMELIA

NIM. 2420215320084

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN 2026**

Judul Tesis : Pengawasan Pemberesan Harta Pailit Yang Memuat Data Pribadi Pada Perusahaan Berbasis Digital

Nama : Zatwa Amelia

Nim : 2420215320084

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

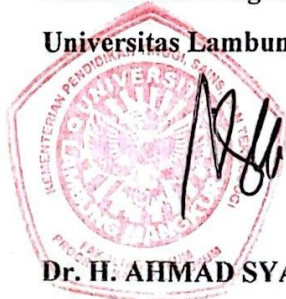
Pembimbing,



Dr. M. YUSMAN, S.H., M.H.
NIP. 19900424202203 1 006

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H
NIP. 19750525200212 2 002

Tanggal lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



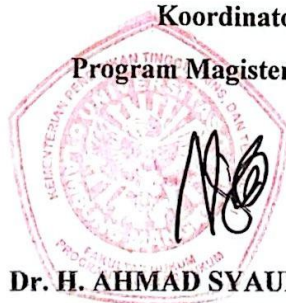
Dr. M. YUSMAN, S.H., M.H.

NIP. 19900424202203 1 006

Disahkan Oleh

Koordinator

Program Magister Hukum



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.

NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H

NIP. 19750525200212 2 002

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 09 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
Sekretaris	: LENA HANIFAH, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota	: Dr. M. YUSMAN, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama. : Zatwa Amelia

NIM. 2420215320084

Program Studi. : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

ZATWA AMELIA

NIM. 2420215320084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hukum menemukan maknanya ketika mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan, hak, dan nilai kemanusiaan di tengah perubahan.”

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Tesis ini bukan sekadar pemenuhan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar magister, melainkan juga menjadi refleksi atas setiap proses, perjuangan, doa, dan pembelajaran yang telah penulis lalui. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga, yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, kekuatan, serta motivasi yang tidak pernah putus dalam setiap perjalanan hidup penulis.
2. Dosen Pembimbing Tesis Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
3. Para Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan evaluasi yang konstruktif sehingga tesis ini dapat disempurnakan dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pengembangan ilmu hukum.
4. Seluruh Dosen dan Sivitas Akademika Program Magister Hukum, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pendidikan penulis.

5. Kantor Hukum Syahrizzaman, S.H. & Rekan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar, bertumbuh, dan memahami praktik hukum secara profesional.
6. Kantor Hukum Rhema Dewi Jayanti, S.H., M.H., yang telah memberikan pengalaman, kepercayaan, serta dukungan dalam pengembangan kemampuan profesional penulis.
7. Sahabat, rekan seperjuangan, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, doa, serta dukungan selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Almamater Program Magister Hukum, yang telah menjadi tempat penulis mengembangkan ilmu pengetahuan, karakter, dan semangat untuk terus memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan perlindungan data pribadi, serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

AMELIA, ZATWA. 2026. PENGAWASAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG MEMUAT DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN BERBASIS DIGITAL Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. 115 halaman.

RINGKASAN

Bagi perusahaan berbasis digital, data pribadi pengguna bukan lagi sekadar informasi yang melekat pada individu, tetapi telah menjadi aset yang menopang nilai bisnis itu sendiri. Masalahnya muncul ketika perusahaan semacam ini dinyatakan pailit. Seluruh kekayaan debitor, termasuk data pribadi yang tersimpan dalam sistemnya, otomatis masuk ke dalam boedel pailit yang harus dibereskan kurator demi melunasi utang kepada kreditur. Di titik inilah dua aturan saling berhadapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menuntut harta debitor dibereskan secara optimal, sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melarang pengalihan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah, bahkan mengancamnya dengan sanksi pidana pada Pasal 67 dan 68. Belum adanya aturan yang menjembatani keduanya membuat kurator, kreditur, dan pemilik data sama-sama berada dalam ketidakpastian.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua hal yakni bagaimana tahapan pemberesan harta pailit yang memuat data pribadi seharusnya dilakukan, dan bagaimana model pengawasan yang dapat menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan hak-hak pemilik data. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep terkait, serta membandingkannya dengan *General Data Protection Regulation Uni Eropa* dan dua kasus internasional, *Toysmart* (2000) dan *In re Celsius Network LLC* (2022).

Hasilnya, ditemukan bahwa data pribadi memang berbeda dari aset pada umumnya karena mengandung dua sisi sekaligus: nilai ekonomi dan hak privasi yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena itu, pemberesannya pun mesti melalui enam tahap yang masing-masing bersandar pada pasal tertentu. Diawali dengan inventarisasi, yakni pencatatan data pribadi secara terpisah dari aset lain (Pasal 21, 98, dan 100 UU Kepailitan), kemudian pengamanan sistem elektronik agar data tidak bocor (Pasal 99 UU Kepailitan jo. Pasal 35-36 UU PDP). Selanjutnya kurator perlu memilah mana data yang murni aset perusahaan dan mana yang tergolong data pribadi terlindungi, sebuah kewajiban yang ditarik dari penafsiran teleologis Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan. Setelah itu masuk tahap pengelolaan, di mana kewenangan kurator tetap dibatasi oleh hak subjek data (Pasal 69 jo. Pasal 20-21 UU PDP), lalu penilaian nilai ekonomi aset digital yang jauh lebih rumit dibanding aset biasa (Pasal 185 UU Kepailitan), dan ditutup dengan pengalihan kepada pihak ketiga yang baru bisa dilakukan jika memenuhi dasar hukum yang sah (Pasal 185 jo. Pasal 107 UU Kepailitan jo. Pasal 20, 21, 67, dan 68 UU PDP).

Namun pengawasan terhadap proses ini masih jauh tertinggal. Hakim pengawas yang seharusnya menjadi penjaga proses kepailitan ternyata kewenangannya hanya didesain untuk aset konvensional, belum menyentuh ranah data pribadi. Akibatnya muncul setidaknya enam persoalan: status data pribadi yang kabur dalam boedel pailit, kewenangan hakim pengawas yang terbatas, tidak ada standar baku bagi kurator dalam mengelola data, ketidakselarasan antara dua undang-undang yang berlaku, absennya pengawasan atas keamanan dan pengalihan data, serta tidak adanya jalur bagi pemilik data untuk memperjuangkan haknya selama proses kepailitan berlangsung.

Sebagai jawaban, penelitian ini mengusulkan model pengawasan berlapis yang bersandar pada empat prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian yang diwujudkan melalui tiga langkah. Pertama, memperkuat kewenangan hakim pengawas agar dapat mengawasi pengelolaan data, menyetujui pengalihannya, dan memastikan kurator patuh pada UU PDP. Kedua, menetapkan standar kerja bagi kurator dalam mengakses, menjaga, dan mendokumentasikan setiap tindakan terhadap data pribadi. Ketiga, membangun jalur perlindungan bagi pemilik data berupa pemberitahuan, pengaduan, dan pelaporan jika terjadi kebocoran selama pemberesan berlangsung.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum dalam mengatur data pribadi pada proses kepailitan perusahaan digital perlu segera diisi. Kepada Pemerintah dan DPR, direkomendasikan agar merevisi Pasal 21, 69, 98, 99, 100, dan 185 Undang-Undang Kepailitan serta menambahkan pasal baru yang secara tegas mengatur kedudukan data pribadi dan batas kewenangan kurator. Sementara itu, Mahkamah Agung dapat segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung, dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dapat menyusun pedoman teknis pengelolaan data pribadi dalam kepailitan sebagai langkah yang bisa ditempuh tanpa harus menunggu perubahan undang-undang terlebih dahulu.

AMELIA, ZATWA. 2026. PENGAWASAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG MEMUAT DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN BERBASIS DIGITAL Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. 115 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kepailitan, Harta Pailit, Data Pribadi, Pengawasan Kurator, Perusahaan Berbasis Digital, Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah struktur aset perusahaan secara fundamental, di mana data pribadi konsumen tidak hanya berfungsi sebagai informasi melainkan juga sebagai sumber nilai ekonomi yang menentukan valuasi perusahaan berbasis digital. Meningkatnya risiko kepailitan perusahaan digital menimbulkan persoalan hukum mendesak karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 belum mengatur kedudukan data pribadi dalam boedel pailit, sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data pribadi sebagai hak privasi yang tidak dapat dialihkan secara bebas. Konflik norma antara kedua rezim hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kurator, kreditur, dan subjek data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pemberesan harta pailit yang memuat data pribadi pada perusahaan berbasis digital serta merumuskan model pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hak-hak subjek data. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta perbandingan hukum dengan GDPR Uni Eropa dan preseden kasus Toysmart (2000) dan In re Celsius Network LLC (2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberesan harta pailit yang memuat data pribadi dilaksanakan melalui enam tahapan: inventarisasi (Pasal 21, 98, 100 UU Kepailitan), pengamanan (Pasal 99 UU Kepailitan jo. Pasal 35-36 UU PDP), verifikasi berdasarkan penafsiran teleologis Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, pengelolaan (Pasal 69 jo. Pasal 20-21 UU PDP), penilaian (Pasal 185 UU Kepailitan), dan pengalihan (Pasal 185 jo. Pasal 107 UU Kepailitan jo. Pasal 20, 21, 67, 68 UU PDP). Data pribadi memiliki karakteristik ganda karena selain bernilai ekonomi juga mengandung hak privasi yang melekat pada subjek data, sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan aset konvensional. Sistem pengawasan hakim pengawas yang berlaku saat ini belum mencakup pengelolaan dan pengalihan data pribadi dalam proses kepailitan.

Penelitian ini merumuskan model pengawasan berlapis yang dibangun di atas prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian melalui tiga pilar: penguatan kewenangan hakim pengawas, penetapan standar pengelolaan data oleh kurator, dan perlindungan hak-hak subjek data selama proses kepailitan. Direkomendasikan revisi Pasal 21, 69, 98, 99, 100, dan 185 UU Kepailitan beserta penambahan pasal baru, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Data Pribadi dalam Kepailitan oleh AKPI.

**AMELIA, ZATWA. 2026. SUPERVISION OF BANKRUPTCY ASSETS SETTLEMENT
CONTAINING PERSONAL DATA IN DIGITAL-BASED COMPANIES** Master of Law

Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University,
Supervisor: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. 115 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Bankruptcy, Bankruptcy Estate, Personal Data, Curator Supervision, Digital-Based Companies, Personal Data Protection*

The development of the digital economy has fundamentally transformed corporate asset structures, where consumer personal data functions not merely as information but also as a source of economic value that determines the valuation of digital companies. The increasing risk of insolvency among digital companies raises urgent legal questions, as Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy, as amended by Law Number 4 of 2023, does not regulate the status of personal data within the bankruptcy estate, while Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection treats personal data as a privacy right that cannot be freely transferred. The normative conflict between these two legal regimes creates legal uncertainty for curators, creditors, and data subjects.

This study aims to analyze the stages of bankruptcy estate settlement involving personal data in digital companies and to formulate a supervisory model that maintains a balance between creditors' interests and data subjects' rights. The research employs a normative prescriptive legal method with statute and conceptual approaches, and comparative analysis drawing on the EU GDPR and precedents from the Toysmart case (2000) and In re Celsius Network LLC (2022).

The findings show that the settlement process is carried out through six stages: inventory (Arts. 21, 98, 100 Bankruptcy Law); security measures (Art. 99 Bankruptcy Law jo. Arts. 35-36 Personal Data Protection Law); verification based on a teleological interpretation of Art. 69(1) Bankruptcy Law; management (Art. 69 jo. Arts. 20-21 Personal Data Protection Law); valuation (Art. 185 Bankruptcy Law); and transfer (Art. 185 jo. Art. 107 Bankruptcy Law jo. Arts. 20, 21, 67, 68 Personal Data Protection Law). Personal data possesses a dual characteristic, as it carries both economic value and inherent privacy rights, and therefore cannot be treated the same as conventional assets. The current supervisory judge system does not yet cover the management and transfer of personal data in bankruptcy proceedings.

This study formulates a layered supervisory model built on the principles of legal certainty, proportionality, accountability, and due diligence through three pillars: strengthening the supervisory judge's authority, establishing data management standards for curators, and protecting data subjects' rights throughout the bankruptcy process. It recommends revision of Articles 21, 69, 98, 99, 100, and 185 of the Bankruptcy Law with new provisions, issuance of a Supreme Court Regulation (PERMA), and preparation of Technical Guidelines on Personal Data Management in Bankruptcy by the Indonesian Curator and Administrator Association (AKPI).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia, petunjuk, serta kemudahan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGAWASAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG MEMUAT DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN BERBASIS DIGITAL”** dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** pada **Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum terlepas dari kekurangan, baik dari sisi substansi, teknik penulisan, maupun kedalaman pembahasan. Namun demikian, seluruh proses penyusunan tesis ini telah menjadi bagian dari perjalanan akademik yang memberikan banyak pelajaran, pengalaman, serta ruang untuk terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penyelesaian tesis ini tentu tidak dapat dicapai hanya melalui usaha penulis sendiri. Terdapat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, doa, arahan, bantuan, serta semangat dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan hingga tesis ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan akademik selama penulis menempuh studi.
2. Bapak Dr. H. Achmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan, perhatian, serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan pada Program Magister Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini. Kesabaran dan perhatian yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Para Dosen Penguji Tesis, yang telah memberikan evaluasi akademik, kritik, serta berbagai masukan yang membangun sehingga tesis ini dapat tersusun dengan lebih baik dan memiliki nilai akademik yang lebih optimal.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Sivitas Akademika Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta pembelajaran yang menjadi bekal berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga, yang senantiasa menjadi tempat bertumpu, sumber doa, kasih sayang, dukungan, dan kekuatan dalam setiap langkah

kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang selalu diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan tahap pendidikan ini.

7. Kantor Hukum Syahrizzaman, S.H. & Rekan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman, memahami praktik hukum secara lebih luas, serta menjadi ruang pembelajaran yang sangat berharga dalam pengembangan kemampuan profesional penulis.
8. Kantor Hukum Rhema Dewi Jayanti, S.H., M.H, yang telah memberikan pengalaman, dukungan, kepercayaan, dan kesempatan kepada penulis untuk terus berkembang dalam memahami dinamika praktik hukum dan dunia profesi.
9. Sahabat, rekan seperjuangan, serta seluruh teman selama masa pendidikan Magister Hukum, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini melalui dukungan, pertukaran pemikiran, motivasi, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses studi.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan kontribusi dalam bentuk apa pun sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga seluruh kebaikan, bantuan, perhatian, dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum kepailitan, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap pemberesan harta pailit pada perusahaan berbasis digital, dan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan penelitian di masa mendatang.

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Penulis

Zatwa Amelia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

RINGKASAN

ABSTRAK

ABSTRACT

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Keaslian Penelitian	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
	E. Tinjauan Pustaka	12
	F. Metode Penelitian	40
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	45
BAB II	TAHAPAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG MEMUAT DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN BERBASIS DIGITAL	47
	A. Kedudukan Data Pribadi sebagai Aset Digital dalam Harta Pailit	47
	B. Mekanisme Pemberesan Harta Pailit yang Memuat Data Pribadi pada Perusahaan Berbasis Digital	55
	C. Permasalahan Hukum dalam Pemberesan Harta Pailit yang Memuat Data Pribadi	67
BAB III	PENGAWASAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG MEMUAT DATA PRIBADI DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN KREDITUR DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	79
	A. Pengawasan Pemberesan Harta Pailit yang Memuat Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia	79
	B. Problematika Pengawasan Pemberesan Harta Pailit yang Memuat Data Pribadi	89
	C. Konsep Ideal Pengawasan Pemberesan Harta Pailit yang	

	Memuat Data Pribadi	97
BAB IV	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		115